



# PROSIDING SAMASTA

## Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia

### UPAYA PENINGKATAN POLA PIKIR MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KESETARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Novia Sherly<sup>1)</sup>, Hasyah Yudistin<sup>2)</sup>, Musfira Arisia Radhini<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>2)</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>3)</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[noviashrly19@gmail.com](mailto:noviashrly19@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memberikan gambaran tentang pola pikir masyarakat yang minim tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan tidak mendapat banyak perhatian, khususnya dari masyarakat. Minimnya pola pikir orang tua dapat berpengaruh terhadap pentingnya Pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak mereka. Hal tersebut dapat menghambat berkembangnya Pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dilakukan strategi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi kepustakaan mengenai kesetaraan pendidikan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan berupa ketersediaan tenaga pendidik, pola pikir masyarakat, dan ketidakadilan gender. Kemudian, ada strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan pendidikan di Indonesia yaitu peningkatan jumlah anak, kebijakan wajib belajar, dan kemajuan di bidang teknologi. Selain itu, untuk dapat meningkatkan pola pikir masyarakat, hal yang perlu dilakukan adalah menyediakan pelatihan untuk tenaga pendidik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan mengadakan program kelompok belajar.

**Kata kunci:** pendidikan, pola pikir, kesetaraan

#### PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi hal yang paling penting dan harus dimiliki setiap warga negara. Setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan sebab hal tersebut dapat menjadi penentu berhasilnya suatu bangsa. Permasalahan yang ada di Indonesia dapat teratasi dengan memanfaatkan pendidikan sebagai pisau bedahnya. Sebagai negara yang menganut

sistem demokratis dimana segala macam hal mengacu pada rakyat, maka pendidikan adalah salah satu bagian yang tidak boleh luput dari perhatian. Tujuan dari poin tersebut adalah agar semua orang khususnya masyarakat Indonesia mendapatkan kesetaraan menyeluruh dengan dibekali pemikiran yang berorientasi pada masa depan.

Salah satu kebijakan pemerataan pendidikan yang perlu dilakukan adalah dengan memastikan seluruh rakyat Indonesia menempuh wajib belajar 12 tahun. Kebijakan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan seiring dengan pemantapan berupa visi, misi, mutu, dan standar kurikulum yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Saud (dalam Badruzzaman, 2013:50) yang mengemukakan bahwa pemerintah mewajibkan program wajib belajar mulai tahun 1994. Terlepas dari itu, yang menjadi inti permasalahan tidak adanya kesetaraan yang menyebabkan banyak orang tidak mengenyam pendidikan yaitu berasal dari pola pikir masyarakatnya. Pola pikir tersebut yang akhirnya membuat pendidikan dipandang rendah.

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara berkembang yang tentu sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam permasalahan yang menyangkut orang banyak. Misalnya seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kemauan untuk belajar, dan kurangnya kesadaran serta minim pola pikir untuk selangkah lebih maju. Hal tersebut sangatlah disayangkan karena dapat menjadi penghambat perluasan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan dalam bidang pendidikan demi tercapainya kesetaraan. Adapun Amalia (2007:5) berpendapat bahwa pendidikan menjadi hal terdepan dalam pembangunan sebab dapat menjadi penentu berhasilnya bangsa khususnya Indonesia dan diharapkan dapat menyesuaikan dengan keadaan di era modern seperti sekarang ini.

Siswanto (2017:55-56) berpendapat bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tanpa

terkecuali. Badruzzaman (2013:49) mengemukakan bahwa pendidikan di Indonesia sangat perlu dilakukan pemerataan karena telah diatur dalam UUD 1945 dimana pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk merealisasikan hal tersebut. Adapun Soltis (dalam Widodo:297) menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi tolak ukur pola pikir dan perilaku dalam ruang lingkup bermasyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi kepustakaan tentang kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Penelitian ini tidak terikat dengan tempat karena memfokuskan penelitian pada upaya peningkatan pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesetaraan pendidikan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan merupakan permasalahan yang cukup serius, khususnya di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang memandang pendidikan bukan suatu keharusan. Salah satu faktor penyebab dari hal tersebut mayoritas berasal dari segi keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dapat mengenyam pendidikan dengan kesetaraan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kebijakan wajib belajar sangat perlu untuk diterapkan. Beberapa aspek yang menunjang pentingnya kebijakan wajib belajar adalah sebagai berikut.

### **1. Hambatan dalam Terwujudnya Kesetaraan Pendidikan**

Tujuan utama pemerintah menyetarakan pendidikan tidak akan terwujud apabila dalam proses

pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti berikut.

**a. Ketersediaan Tenaga Pendidik**

Penerapan pendidikan tentu memerlukan pendidik yang diharapkan dapat menjadi penentu berhasilnya generasi suatu bangsa. Pendidik yang dimaksudkan adalah orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga profesional dan terampil. Seorang pendidik harus menguasai kemampuan dasar dalam mengajar dengan berbekal pengetahuan yang luas serta modern sebab nantinya dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam situasi formal, pendidik menjadi sumber kekuatan yang memegang kendali penuh untuk memajukan masyarakat Indonesia.

**b. Pola pikir Masyarakat**

Salah satu inti permasalahan yang ada di Indonesia bersumber dari pola pikir masyarakatnya. Mayoritas memandang bahwa pendidikan bukan hal utama yang harus dipenuhi karena yang menjadi prioritas adalah finansial. Tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pendidikan masih sangat minim sehingga menimbulkan perbedaan pandangan pada kebijakan pemerintah. Untuk mengenyam pendidikan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Mulai dari kurang efektif dalam segi waktu, membutuhkan banyak uang, hingga sistem kurikulum yang dinilai kurang memadai.

**c. Ketidakadilan Gender**

Mursidah (2013:278) mengemukakan bahwa program pendidikan memiliki tujuan yakni mentransfer ilmu, norma, pemahaman mengenai kesetaraan gender, dan bagaimana cara mengembangkan pola pikir masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut jelas digambarkan bahwa gender menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi sistem pendidikan. Pada zaman modern, pemerolehan pendidikan harus menyeluruh. Sudah bukan waktunya lagi untuk memandang bahwa hak pendidikan hanya dimiliki oleh salah satu gender. Sistem patriarki menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan.

**2. Strategi Kesetaraan Pendidikan di Indonesia**

Untuk mencapai kesetaraan pendidikan di Indonesia, tentu perlu dilakukan pematapan strategi. Amalia (2007:23-25) mengemukakan bahwa pencapaian pada kesetaraan pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut.

**a. Peningkatan Jumlah Anak**

Peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, akses terhadap pendidikan dihitung berdasarkan angka partisipasi yang dimulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Selain dari itu juga pemerintah akan mengurangi tingkat ketidakmerataan pendidikan yang ada di daerah tertinggal sehingga pendidikan yang sebelumnya masih dikatakan di bawah standar

menjadi pendidikan yang unggul. Semakin banyak jumlah anak yang terdidik, maka semakin besar pula peluang untuk menyetarakan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

**b. Kebijakan Wajib Belajar**

Dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar bagi peserta didik diperluas dengan adanya penambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti apa yang telah dimandatkan dalam aturan pemerintah 2 Mei 1994. Peningkatan wajib belajar pada peserta didik ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang sesuai dengan minat peserta didik, dengan hal itu peserta didik juga semangat dalam proses pembelajaran dikarenakan materi yang mereka dapatkan itu sesuai dengan minat mereka. Adanya kebijakan wajib belajar juga dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia dapat memperoleh pedoman pengetahuan dan kesetaraan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.

**c. Peningkatan di Bidang Teknologi**

Kemajuan teknologi menjadi strategi terbaik dalam upaya pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia terutama pada masyarakat yang ada daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Maka dari itu, teknologi dijadikan suatu usaha untuk menyediakan akses yang tidak bisa dijangkau

oleh daya beli mereka. Salah satu contoh teknologi sebagai pemerataan pendidikan yaitu *gadget*. Hampir semua masyarakat yang ada di Indonesia semuanya mempunyai *gadget*. Fungsi gadget dalam pemerataan pendidikan yaitu dapat menginformasikan suatu pesan dari orang satu ke orang banyak. Eksistensi dalam media komunikasi pada prinsipnya bertujuan untuk dapat menginformasikan segala bentuk pembelajaran kepada masyarakat luas. Dengan adanya peningkatan dari segi kualitas teknologi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang nantinya mempermudah pencarian informasi sebagai bahan belajar.

**3. Upaya Peningkatan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Pentingnya Kesetaraan Pendidikan di Indonesia**

Pola pikir masyarakat Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan. Mulai dari ruang lingkup kecil seperti diri sendiri hingga ruang lingkup yang lebih besar seperti masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan yang dimaksud adalah dengan mengubah persepsi tentang konsep pendidikan yang mahal, membuang waktu, tidak efektif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus diterapkan upaya yang bertujuan untuk meluruskan cara pandang dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya belajar demi tercapainya program pendidikan yang berkualitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk menelaraskan antara pola pikir masyarakat dengan pendidikan adalah sebagai berikut.

Pertama, menyediakan pelatihan untuk tenaga pendidik. Saat ini, tenaga pendidik yang profesional sangat sulit untuk ditemukan. Hal ini dapat terjadi karena kurang adanya pelatihan yang memadai sehingga para pendidik tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengajar. Padahal, pendidik menjadi satu-satunya subjek yang diharapkan mampu mengantar generasi bangsa menuju persaingan global. Maka dari itu, bentuk pelatihan menjadi landasan awal untuk menciptakan pendidik yang bukan hanya cerdas tetapi juga profesional.

Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mendapatkan rasa kepedulian tentang pentingnya pendidikan caranya adalah terjun langsung, terutama pada kalangan masyarakat terpencil. Masyarakat terpencil lebih diutamakan karena kemungkinan besar mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai program pendidikan. Bentuk sosialisasi itu sendiri dapat berupa pemberian pemahaman tentang apa itu pendidikan, seberapa penting hal tersebut, bagaimana perannya, serta seperti apa timbal baliknya untuk masyarakat.

Ketiga, mengadakan program kelompok belajar. Upaya ini mengacu pada tujuan utama yaitu tercapainya kesetaraan pendidikan. Dengan adanya program kelompok belajar, maka semua orang dapat merasakan bagaimana mengenyam pendidikan walaupun bukan dalam ruang lingkup formal. Hal ini juga selaras dengan kegiatan sosialisasi sebagai upaya penyeteraan pendidikan. Program kelompok belajar dapat beriringan dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat karena

yang diberikan bukan hanya gambaran dan pemahaman tentang pendidikan tetapi juga bentuk nyatanya. Upaya ini tentu diikuti dengan materi yang cukup serta ketersediaan tenaga pendidik. Kesiapan program kelompok belajar yang baik dapat menarik perhatian masyarakat sehingga dapat melahirkan *output* berupa peserta didik yang cerdas, cerdik, mampu berpikir kritis, dan visioner serta menjadi generasi bangsa yang cemerlang.

## KESIMPULAN

Pendidikan menjadi aspek penting yang harus dipenuhi di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Pemahaman pendidikan oleh masyarakat Indonesia masih tergolong minim dan memandang hal tersebut tidak lebih penting daripada finansial. Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pola pikir yang keliru terhadap pendidikan seperti kurang efektif dari segi waktu, adanya ketidakadilan gender, serta masih tergolong mahal sehingga mengakibatkan banyak anak usia sekolah tidak mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencapai kesetaraan pendidikan di masyarakat yaitu dengan cara menyediakan pelatihan untuk tenaga pendidik, melakukan sosialisasi, dan mengadakan program kelompok belajar. Hal tersebut tentu dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang memiliki wewenang tentang pendidikan di Indonesia.

## REFERENSI

- Amalia, Eka Rezeki. 2007. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. Makalah.
- Badruzzaman. 2013. *Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Sorong*. *Jurnal Al-Qalam*. 19(1): 49-50.

Mursidah. 2013. *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jurnal Muwazah. 5(2): 278-279.

Siswanto, Agus. 2017. *Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul*. Jurnal Hanata Widya. 6(7): 55-56.

Widodo, Heri. 2015. *Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia*. Jurnal Cendekia. 13(2): 296-297.